

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adji, Oemar Seno, 1966, *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Seruling Massa, Jakarta.

_____, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Azhary, Muhammad Tahir, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta.

Bahar, Saafroedin, dan Nanie Hudawati, 1995, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, Sekretariat Negara RI*, Jakarta.

Basroh, Abu Daud, 1990, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Budihardjo, Miriam, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Bridges, Lee, dan Maurice Sunkin, 1995, *Judicial Review in Perspective*, The Glass House, London.

Dicey, Albert Venn, 1971, *Introduction to the Law of the Constitution*, Macmillan Press, London.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hadjon, Phipilpus M., 1999, *Menulis Laporan Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Hart, Sir William O., dan J.F Garner, 1973, *Introduction to the Law of the Local Government and Administration*, Butterworths, London.

- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- _____, 2013, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia - Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 1999, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Isjwara, Fred, 1974, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung.
- Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung.
- Kelsen, Hans, 1967, *Pure Theory of Law*, University of California Press, London.
- _____, 1973, *General Theory of and State*, Transaction Publication, New Jersey.
- Latif, Abdul, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Makhfudz, Muhammad, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhtaj, Majda El-, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1845 Tahun 2002*, Prenada Media, Jakarta.
- Sjarifudin, Ateng, 1985, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Binacipta, Bandung.

- _____, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sinaga, Budiman N.P.D., 2009, *Hukum Tata Negara, Perubahan Undang-Undang Dasar*, Tatanusa, Jakarta.
- Soebechi, Imam, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitjo 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soewandi, 1957, *Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Strong, C.F., 1966, *Modern Political Constitution*, Sidgwick & Jackson Limited, London.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Wasistiono, Sadu, 2002, *Kapita Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alqprint, Bandung.
- Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016*, Mahkamah Agung, Jakarta.

B. JURNAL

- Aziz, Machmud, “Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober, 2010.
- Basuki, Udiyo, “*Quo Vadis* UUD 1945; Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012,

- Jati, Wasisto Raharjo, “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember, 2012.
- Karyana, Ayi, “Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka”, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1, Februari, 2012.
- Kurniasih, Dewi, “Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bandung”, *Ragam Kajian Science*, Volume 1, September, 2010.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun, “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi Kedepan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- Pitono, Andi, “Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 3 Nomor 1, Maret, 2012.
- Rangkuti, Afifa, “Nomokrasi Islam dan Neraka Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Hukum Tata Negara”, *Jurnal As-Sais*, Volume 5, Nomor 5, 2017.
- Sanjaya, “Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2015.
- Simamora, Janpatar, “Analisa Yuridis Terhadap Kewenangan *Judicial Review* di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, Oktober, 2013.
- Wasistiono, Sadu, “Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)”, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume 1, Edisi Kedua, Tahun 2004.
- Zuhraeni, “Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule of Islamic Law*) terhadap Negara Hukum Pancasila”, *Al-Adalah*, Volume XII, Nomor 1, Juni, 2014.

C. PENELITIAN / TUGAS AKHIR

- Bestyardi, “Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Saputra, Agung Maldi, “Pengaturan Executive Review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.

D. MAKALAH

Hadjon, Philipus M. “Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih”, *Makalah*, Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

Manan, Bagir, “Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”, *Makalah*, Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000.

_____, “Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif”, *Makalah*, Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro, Cianjur, 26 Juli 2000.

MD, Mahfud, “Penuangan Pancasila di dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Makalah*, disampaikan pada seminar Nasional Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang-undangan Indonesia, diseleggarakan oleh Fakultas Hukum UGM dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila di Yogyakarta, 30-31 Mei 2007.

South East Asian and Pasific Conference of Jurist, “The Dynamic Aspect of The Rule of Law in The Modern Age”, *Makalah*, International Commision of Jurist, Bangkok, 15-19 February 1965.

E. ARTIKEL INTERNET

Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Deny, Septian, “Mendagri: 1.300 Perda Dicabut Lantaran Hambat Investasi”,
<http://bisnis.liputan6.com/read/2500129/mendagri-1300-perda-dicabut-lantaran-hambat-investasi?source=search>.

Isra, Saldi, “Pembagian Kewenangan Pusat-Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”,
<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/336-pembagian-kewenangan-pusat-daerah-dalam-Undang-Undang-nomor-11-tahun-2006-tentang-pemerintahan-aceh.html>.

Liputan6.com, “Jokowi Resmi Hapus 3143 Perda Bermasalah”
<http://news.liputan6.com/read/2530343/jokowi-resmi-hapus-3143-perda-bermasalah>.

Zoelva, Hamdan, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila,
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3915&Itemid=285.

F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 560-294 Tahun 2015 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

G. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi 137/PUU-XII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.